

SKRIPSI

**PERAN FIGUR PUBLIK DALAM MENDORONG POPULARITAS DAN
ELEKTABILITAS PARTAI PDI PERJUANGAN DI KABUPATEN
MAJENE**

RIFAIL ANDIKA HARUN

F01 18 324

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)
Pada Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2023**

ABSTRAK

“Peran Figur Publik Dalam Mendorong Popularitas Dan Elektabilitas PDI Perjuangan di Kabupaten Majene”

Peran figur publik dalam mendorong popularitas dan elektabilitas PDI Perjuangan. Figur publik yang dimasukkan ke dalam yakni Arwin B. dan H. Parman sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama metode pelengkapya adalah dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan peran figur publik dalam dalam mendorong popularitas dan elektabilitas PDI Perjuangan di kabupaten Majene. Setelah melakukan penelitian menunjukkan bahwa peran seorang figur publik dalam mendorong popularitas dan elektabilitas partai PDI Perjuangan di kabupaten Majene yakni dengan melakukan suatu pendampingan kepada masyarakat, mengamalkan sifat gotong royong ke masyarakat, selalu dekat dengan masyarakat, memberikan gambaran tokoh historis di dalamnya dan terus menyosialisasikan kepada masyarakat.

kata kunci : Figur Publik, Popularitas, Elektabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Setiap partai politik tentunya memiliki harapan untuk meraup suara penuh pada pemilihan umum, oleh karena itu pemanfaatan popularitas figur publik merupakan cara ampuh untuk meraup suara penuh pada pemilihan umum. Selain mempunyai popularitas yang tinggi, figur publik ini sendiri pada umumnya mempunyai kemampuan dalam membuat medianya sendiri agar bisa lebih mudah dikenal serta mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat agar tingkat keterpilihannya atau elektabilitas-nya dapat terus meningkat.

Figur publik yaitu seseorang yang dikenal masyarakat luas karena kemampuannya dalam komunikasi maupun dalam kompetensinya. Dengan demikian penggunaan figur publik sangat berpengaruh terhadap citra setiap partai politik yang kemudian publik yakni masyarakat dengan besar harapan akan percaya untuk memilih calon pemimpin yang diinginkannya. Begitupun cara masyarakat mengenal figur publik tersebut karena seringnya muncul di media dan tampil di muka umum.

Setiap partai politik tentunya memiliki harapan untuk meraup suara penuh pada pemilihan umum, oleh karena itu pemanfaatan popularitas figur publik merupakan cara ampuh untuk meraup suara penuh pada pemilihan umum.

Selain mempunyai popularitas yang tinggi, figur publik ini sendiri pada umumnya mempunyai kemampuan dalam membuat medianya sendiri agar bisa lebih mudah dikenal serta mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Dari sisi aspek psikologi politiknya ada dua pengaruh sosok figur yang signifikan terhadap keberadaan dan eksistensi partai politik, terutama yang berkaitan dengan tingkat elektabilitas partai politik ditengah-tengah masyarakat. dalam kacamata psikologi, kita bisa melihat dari beberapa aspek yang menjadi faktor mengapa seseorang pemimpin bisa dibenci dan disenangi oleh masyarakat secara luas, baik dari segi latar belakang, motivasi sikap perestasiannya, dan karakternya.

Arti dari figur publik itu sendiri yaitu seseorang yang dikenal masyarakat luas karena kemampuannya dalam komunikasi maupun dalam kompetensinya.

Dengan demikian penggunaan figur publik sangat berpengaruh terhadap citra setiap partai politik yang kemudian publik yakni masyarakat dengan besar harapan akan percaya untuk memilih calon pemimpin yang diinginkannya. Begitupun cara masyarakat mengenal figur publik tersebut karena seringnya muncul di media. Penggunaan figur publik dalam kampanye maupun sebagai pasangan calon pemimpin.

Dalam penggunaan *figur publik* dalam kampanye maupun sebagai pasangan calon pemimpin. Penampilan figur publik merupakan suatu strategi untuk memberikan penekanan, nilai tambah dan mengangkat produk itu menjadi cepat dikenal¹. Dengan begitu penggunaan figur publik sebagai calon

¹ Praktiko (1982, hlm. 56)

pemimpin kepala daerah merupakan strategi partai politik untuk meraup suara publik yang tinggi. Salah satu strategi partai politik untuk meraup suara yang tinggi yaitu dengan iklan politik, di sinilah peran figur publik dapat menarik publik untuk memilih partai politiknya.

Periklanan adalah segala bentuk pengumuman yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk merubah pikiran orang-orang agar membeli barang yang ditawarkan². Dengan begitu teori diatas merupakan iklan yang dapat meningkatkan daya tarik publik, maka dari itu figur publik disini dapat menawarkannya kepada publik.

Arti dari *figure public* itu sendiri yaitu seseorang yang dikenal masyarakat luas karena kemampuannya dalam komunikasi maupun dalam kompetisinya. memiliki popularitas, figur publik ini pada umumnya mempunyai kekuatan dalam medianya sendiri agar bisa lebih mudah dikenal serta mampu memebrikan pengaruh kepada masyarakat. Mengenal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) partai besar yang beraliran nasionalis dan salah satu partai besar di indonesia, yang di ketua anak dari tokoh atau bapak proklamator Ir. Soekarno yakni Megawati Soekarno Putri.

Indonesia negara yang masih belajar dalam memantapkan demokrasi harus terus-menerus melakukan perbaikan pada pelebagaan partai politik yang masih belum tertata dengan baik. karena lemahnya pelebagaan partai politik membuat sosok *figure* sangatlah dibutuhkan sebagai referensi calon pemilih untuk mementukan partai politik pilihannya, nah ketika identitas

² Webster (dalam Kertapati, 1982, hlm. 52)

partai-partai politik terlanjur memudar, publik hanya bisa melihat dan menilai dari si figurnya yang dimiliki oleh partai tersebut sebagai representasi dalam menilai kualitas partai politik. Kita melihat fenomena ini yang dimana tokoh/seseorang dalam hal menumbuhkan kekuatan partai politik sebenarnya bukan hanya terjadi di negara Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara yang di mana sudah dalam taraf maju demokrasi-nya seperti Amerika dan negara seperti di Eropa yakni Italia.

Dalam manuver politik yang begitu mengedepankan yang namanya gotong royong sebagaimana yang terus dikumandangkan oleh sosok Ir. Soekarno. Melihat beberapa manuver politik yang dilakukan oleh beberapa partai saat ini yang dimana dalam meningkatkan sebuah kekuatan politik, yang dimana setiap partai tentu memiliki seorang figur yang mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas wadah perjuangan dalam konteks politik.

Salah satu strategi partai politik untuk meraup suara yang tinggi yaitu dengan iklan politik, di sinilah figur publik dapat menarik publik untuk memilih partai politiknya. Figur tentunya memiliki kekuatan yang penting dalam memajukan suatu partai politik, bukan tak lain yang pertama adalah mengenai karismatik, dengan karisma inilah yang mereka miliki, membantu memudahkan partai politik untuk mencari massa atau kekuatan dengan sebanyak-banyaknya. Dan kedua adalah dari segi finansial, tak bisa dipungkiri bahwa untuk menjalankan sebuah lembaga/oraganisasi atau partai politik, membutuhkan dan yang tidak kecil, disini-lah penting-nya figur yang mempunyai kekuatan finansial.

Partai politik merupakan sarana publik dalam menjalankan aspirasinya. Dengan adanya partai politik manajemen permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa terakomodasi dengan baik. Dalam catatan sejarah, keberadaan partai politik relatif masih baru yaitu berawal dari daratan Benua Eropa ketika masyarakat menyadari bahwa rakyat adalah komponen penting yang harus diperhitungkan dalam setiap proses politik yang ada. Maka, lahirlah partai politik sebagai sarana penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Figur merupakan salah satu elemen penting dalam partai politik. Figur bisa menjadi pendorong, navigator, dan inspirator berjalannya partai politik. Begitu pula sosok figur sangat membutuhkan partai politik sebagai sarana untuk menjalankan idealisme dan pengabdianya. Figur menjadi kurang bertaji bila tidak didorong partai politik yang kuat.

Kemampuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Istilah figur, tokoh, elit, pemimpin adalah empat istilah yang hampir punya kaitan pengertian yang sama. Keempat istilah tersebut tidak terlepas dari beberapa kriteria yaitu individu-individu yang punya kemampuan, kecerdasan, dan punya pengikut dalam menjalankan cita-cita dan keinginannya. Ketika kita menyebut seperti nama Megawati, Prabowo, SBY, Surya Paloh dan Gus Dur pasti kita semua bersepakat bahwa keempat orang tersebut adalah figur, tokoh, pemimpin, dan juga elit. Contoh ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa empat istilah ini punya kesamaan dan ciri yang sama.

Beberapa figur yang ada di belakang partai politik setidaknya memiliki dua kekuatan penting. *Pertama* karismatik, dengan karisma yang mereka miliki, membantu memudahkan partai politik untuk mencari massa dengan sebanyak banyaknya. Menurut Yukl pemimpin karismatik mempunyai beberapa perilaku antara lain: ³

- 1) Pemimpin memiliki perilaku yang selalu dipercaya oleh pengikutnya sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin selalu memberikan kesan tersendiri dan yakin atas kompetensi yang dimiliki pemimpin sehingga mereka hanya patuh dan taat.
- 2) Pemimpin memiliki perilaku yang sangat menekankan tujuan dasar kelompok berdasarkan pada cita-cita, nilai-nilai, harapan dan keinginan para pengikutnya.
- 3) Pemimpin ini memiliki visi menarik tentang masa depan organisasi yang lebih baik, disinilah pengikut akan mempunyai hubungan emosional kepada pemimpin sehingga memotivasi para pengikut untuk tetap berkomitmen sampai tujuan yang telah ditetapkan tercapai;
- 4) Pemimpin ini mempunyai perilaku sebagai teladan untuk para pengikutnya sehingga pemimpin dapat memberi pengaruh yang lebih besar karena para pengikutnya telah mempunyai nilai-nilai dan keyakinan yang sama dengan pemimpin tersebut.
- 5) Pemimpin ini akan selalu memberikan harapan dan kepercayaan kepada para pengikutnya dengan tujuan agar para pengikut mempunyai komitmen

³ Marginingsih, 2016

dan kinerja yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kedua *finansial*, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjalankan sebuah organisasi partai politik, membutuhkan dana yang tidak kecil, di sinilah pentingnya figur yang mempunyai kekuatan finansial yang mumpuni.

Dari aspek psikologi politik ada pengaruh sosok figur yang signifikan terhadap keberadaan dan eksistensi partai politik, terutama berkaitan dengan tingkat elektabilitas partai politik di tengah-tengah masyarakat. Dalam kaca mata psikologi, kita bisa melihat dari beberapa aspek yang menjadi faktor mengapa seorang pemimpin bisa dibenci dan disenangi oleh masyarakat secara luas, baik dari segi latar belakang, motivasi, sikap, karakter, dan prestasinya.

Ada dua pendekatan yang bisa dipakai dalam mengamati kepemimpinan politik.

Pertama, pendekatan *agent-centered*. Yakni pendekatan yang berpandangan bahwa kepemimpinan politik lebih banyak dipengaruhi oleh sang aktor, baik dari segi kapasitas, ciri kepribadian, serta tindak-tanduknya.

Faktor di luar diri aktor, dalam pandangan pendekatan ini tidak punya pengaruh terhadap bentuk dan kepemimpinan politik. Dalam pendekatan ini, mengharuskan sosok pemimpin yang ideal dan punya kelebihan yang jarang dimiliki masyarakat umum.

Kedua, pendekatan *environment-centered*. Menurut pendekatan ini, kepemimpinan politik lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan serta pengaruh dari orang-orang yang bekerja pada seorang pemimpin politik. Artinya, letak jantung maju mundurnya kepemimpinan politik tidak terfokus pada figur pemimpin, akan tetapi faktor-faktor eksternal di luar seorang pemimpin yang menentukan maju mundurnya partai politik.

Daerah kabupaten majene yang dimana di daerah pemilihan ini terdapat dua yang menduduki kursi Parlemen DPRD dari PDI Perjuangan, dua figure ini berada di daerah pemilihan 1 kec. banggae dan banggae timur yakni Arwin B dan daerah pemilihan 2 di kecamatan pamboang, sendana, tamerodo sendana, tubo sendana yakni H. Parman, masing-masing keduanya terpilih pada periode tahun 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tentunya dalam setiap masyarakat dalam hal menentukan suatu pilihan dengan melihat citra seorang figure.

Dan sekarang daerah pemilihan telah berubah di tahun 2023 dimana daerah pemilihan di Kabupaten Majene berubah dari 3 daerah pemilihan menjadi 4 daerah pemilihan dan sekarang Arwin B. Berada pada dapil 2 dan H. Parman berada di daerah pemilihan 4.

Penelitian ini akan membahas dan menggali jauh Peran Figur Publik dalam meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas partai PDI perjuangan. Peneliti berharap dengan melakukan penelitian tersebut akan membuka lebar pertanyaan-pertanyaan publik yang selama ini mengenai pengaruh seorang Figure Public dalam partai politik khusus pada Partai PDI Perjuangan.

dimana PDI Perjuangan yang sering disiuken sebagai partai yang berideologi komunis, dan tentu peran seorang figure publik sangat dibutuhkan untuk menuntaskan salah satu hal tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran . Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, menurut soerjono seokanto apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

Tentu dengan kepopuleran seseorang dapat menguntungkan keterpilihan di sebuah daerah, dimana paradigma berfikir masyarakat di kabupaten majene dilihat dari kultur yang masih agak kental terhadap yang namanya struktur dalam sebuah lingkungan sosial. dalam hal ini seorang peran figure dalam meningkatkan popularitas serta elektabilitas partai tentunya perlu diketahui.

Bagaimana Peran Figure Public dalam meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas partai PDI Perjuangan menarik untuk kita tahu bersama sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. seorang yang berkecimpung di dunia akademisi khususnya bidang studi ilmu politik. wawasan keilmuan memang harus maju demi terciptanya apa disebut dengan kesejahteraan bersama.

Alasan penulis memilih judul skripsi yang berjudul “Peran Figur Publik Dalam Mendorong Popularitas Dan Elektabilitas Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Majene” dimana Penulis tertarik ingin mengetahui sejauh mana

peran seorang figure public dalam mendorong popularitas dan elektabilitas partai politik, khususnya dalam ranah PDI Perjuangan di kabupaten Majene.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Arwin B dan H. Parman Dalam Mendorong Popularitas Dan Elektabilitas Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Majene ?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan demi untuk menghindari adanya kekeliruan, penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan penulis dalam pembahasannya, Sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tertuju pada figure public yakni Arwib B dan H. Parman
2. Informasi yang akan dihadirkan mengenai peran Figure Public Dalam Mendorong Popularitas Dan Elektlabilatas Partai PDI Perjuangan. Diambil dari pengsisi kursi PDI Perjuangan di Kabupaten majene.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran seorang figure public dalam sebuah organisasi (PDI Perjuangan).
2. Seberapa besar peran figur publik dalam mendorong popularitas dan elektabilitas partai politik khususnya pada partai PDI perjuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti baik bagi kalangan akademisi maupun lembaga pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dalam melihat situasi politik tanah air.
2. Memberikan pengetahuan kepada Masyarakat Luas dalam melihat sebuah ukuran mengenai bagaimana sebuah pengaruh seseorang atau tokoh Figur Publik dalam meningkatkan Popularitas Dan elektabilitas Partai politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dengan judul penelitian peran Figur Publik dalam mendorong popularitas dan elektabilitas partai PDI Perjuangan di Kabupaten Majene. Adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut :

M. Ridoi pada tahun 2016 dengan judul Kekuatan figur dalam partai politik (studi terhadap Abdurahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa). Semenjak pertama kali PKB berdiri pada tahun 1998 sampai sekarang. PKB empat kali mengikuti pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Dari empat kali pemilihan umum menggambarkan bahwa Gusdur memiliki kekuatan untuk memaksimalkan suara partai. Hasil survey menunjukkan semakin tinggi tingkat kesukaan public terhadap Gus Dur, berkorelasi terhadap perolehan suara PKB, begitu pula sebaliknya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan teori sumber kekuasaan, teori dimensi kekuasaan dan teori otoritas karismatik, sedangkan teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teori peran.

Lisda Nurul Romdoni 2019, Pengaruh Penggunaan Figur Publik Dalam Kampanye Terhadap Tingkat Perolehan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2018 Di Kota Bandung. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian adalah masyarakat Kota Bandung berjumlah. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah dengan menggunakan angket, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap tingkat perolehan suara dengan persentase sebesar 61,29 %.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berada pada metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif dan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan teori pengaruh sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1 Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi maupun disiplin ilmu.⁴ Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “Peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai Tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi actor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi actor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau actor tersebut.

⁴Soekanto, 2009:212-213

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran, dimana teori peran beranggapan bahwa peranan seseorang itu merupakan hasil interaksi diri dengan posisi (status dalam masyarakat) dan dengan peran (menyangkut norma dan nilai). Yang penting dalam teori peran ini adalah actor (pelaku) dan target (sasaran).

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran⁵. Lima aspek penting dari peran, yaitu: Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya⁶.

Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity dan role ambiguity*) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kemasyarakatan
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁵ Soekanto, 2007:237

⁶ Philip L, K (2009: 197

Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. Menurut Polak, peranan adalah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal. Dengan demikian peranan adalah pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek⁷.

Teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku *Mind, Self, and Society* (1972), Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain Menurut Mead pengembangan diri manusia berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Tahap persiapan (*Preparatory Stage*) Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Dalam tahap ini, individu sebagai calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Lingkungan yang memengaruhi termasuk individu yang berperan dalam tahapan ini relatif sangat terbatas, sehingga proses penerimaan nilai dan norma juga masih dalam tataran yang paling sederhana.

⁷ Ndraha, 2012:114

- b) Tahap Meniru (*Play Stage*) Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari dirinya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak telah juga mulai terbentuk.
- c) Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*) Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Pada tahap ini individu mulai berhubungan dengan teman teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.
- d) Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*Generalizing Stage*) Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, dia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat secara luas.

Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Dalam tahap ini, individu dinilai sudah mencapai tahap kematangan untuk siap terjun dalam kehidupan masyarakat.⁸

Pandangan lain yang juga menekankan pada peranan interaksi dalam proses sosialisasi adalah Charles H. Cooley. Menurut Cooley konsep diri (*self concept*) seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain oleh Cooley diberi nama *looking-glass self*. Cooley menamakannya demikian karena melihat analogi antara pembentukan diri seseorang dengan perilaku orang yang sedang bercermin; kalau cermin memantulkan apa yang terdapat di depannya, maka menurut Cooley diri seseorang pun memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Cooley berpendapat bahwa *looking-glass self* terbentuk melalui tiga tahap.

Pada tahap pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Pada tahap kedua, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Pada tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu.

⁸ (George Herbert Mead, 1972).

Ada dua faktor yang secara garis besar dapat memengaruhi proses sosialisasi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.

- a) Faktor Intrinsik Sejak lahir manusia sesungguhnya telah memiliki pembawaan-pembawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan-kemampuan khusus warisan orang tuanya. Hal itu disebut sebagai faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ini akan menjadi bekal seseorang untuk melaksanakan beragam aktivitas dalam sosialisasi. Hasilnya akan sangat berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri.
- b) Faktor Ekstrinsik Sejak manusia dilahirkan dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas agar sikap dan perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Perpaduan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik akan berakumulasi pada diri seseorang dalam melaksanakan sosialisasi.

Jenis Sosialisasi Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi

tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan dia tur secara formal.

- a) Sosialisasi primer Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.
- b) Sosialisasi sekunder Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

Tipe Sosialisasi Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Contoh, standar apakah seseorang itu baik atau tidak di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang

disebut baik apabila nilai ulangnya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Formal Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.
- b) Informal Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan adanya proses sosialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri. Misalnya, apakah saya ini termasuk anak yang baik dan disukai teman atau tidak? Apakah perilaku saya sudah pantas atau tidak?.

Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus

2.2.2. Defenisi Figur Publik

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia figur diartikan sebagai; pertama bentuk; wujud, kedua, tokoh. dari arti ini, kita bisa memahami bahwa figur adalah individu-individu yang sudah menjadi tokoh dan punya peran sentral di tengah-tengah masyarakat, berbicara soal figur kita tak dapat lepas dari pengertian seorang pemimpin. meskipun sebenarnya figur derajatnya jauh lebih tinggi dari pemimpin. figure yang dimana sebagai suatu magnet untuk mendokrak suara partai dalam kontekstasi politik.

Figur adalah individu yang mempunyai kelebihan, sehingga layak untuk menjadi representase banyak orang. Figur merupakan sosok yang memaminkan peran penting dalam menentukan kebijakan, termasuk strategi dan peraturan internal.

Pengamat politik LIPI menjelaskan tentang karakteristik seorang figur dengan kriteria⁹: “Memiliki peran yang penting dalam kehidupan partai secara umum, yang disebabkan kekuasaan-kekuasaan politik yang dimiliki, apakah itu atas dasar peran penting dalam pendirian partai (historical reason) keluasan jaringan, karisma pribadi, sebagai penerjemah dan pelaksana ideologi partai (*ideolog*), pengetahuan atau visi, kekuatan finansial, kemampuan berkomunikasi, memiliki akses besar pada pemerintahan, keturunan atau kemampuan manajerial.”

⁹Firman Noor (2016)

Esensi dari figur itu sendiri punya kesamaan dengan esensi dari istilah tokoh, pemimpin, atau elit. Hamdi Muluk dalam bukunya *Mozaik Psikologi Politik Indonesia* (2010) menjelaskan bahwa seorang pemimpin pada dasarnya tidak harus memiliki kemampuan yang luar biasa, pemimpin hanya diuntut memiliki kualitas akhlak dan keteladanan yang luar biasa, pemimpin harus amanah, segala tingkah lakunya harus bisa menjadi teladan bagi para pengikutnya. Beberapa kriteria di atas menjadi poin penting bagi seorang individu untuk disebut sebagai seorang figur atau pemimpin.

Tanpa kualitas akhlak, keteladanan, dan kredibilitas seorang figur sangat sulit untuk menjadi seorang figur, karena pada hakikatnya figur muncul bukan dari rekayasa atau hanya dibuat-buat, seseorang individu bisa menjadi figur karena adanya kepercayaan dan legitimasi dari publik, dan itu semua bisa didapatkan bila masyarakat sudah melihat keteladanan, kredibilitas dan kemampuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Istilah figur, tokoh, elit, pemimpin adalah empat istilah yang hampir punya kaitan pengertian yang sama. Keempat istilah tersebut tidak terlepas dari beberapa kriteria yaitu individu-individu yang punya kemampuan, kecerdasan, dan punya pengikut dalam menjalankan cita-cita dan keinginannya. Ketika kita menyebut nama Megawati, Ridwan Kamil, Prabowo, SBY, dan Gus Dur pasti kita semua bersepakat bahwa kelima orang tersebut adalah figur, tokoh, pemimpin, dan juga elit. Contoh ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa empat istilah ini punya kesamaan dan ciri yang sama.

Figure public merupakan suatu hal yang tak asing lagi bagi kita terhadap kata *figure public*. *Figure public* merupakan sosok atau tokoh yang dikenal secara luas dan baik ditengah tengah masyarakat, seperti seorang artis, pengusaha, bangsawan, maupun dari kalangan pejabat pemerintah.

2.2.3. Popularitas dan Elektabilitas

a) Popularitas

Popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata umum atau public. Dalam kajian sosial, kecenderungan pada popularitas diistilahkan dengan *hobbenietzschean*, yaitu orang yang ingin dikenal baik pada ruang-ruang public.

Dalam kenyataannya seringkali kita melihat klaim kepemilikan tokoh bangsa oleh beberapa golongan politik. Komunikasi politik yang dikemas dengan iklan, reklame, dan poster, serta slogan politik lainnya memang penting untuk mendongkrak popularitas, kita lihat saja waktu pemilihan umum tahun 2019 partai-partai politik baru turut menjadikan *figure* sebagai bagian dari strategi politiknya contohnya saja partai berkarya *figure* sentralnya yaitu ketua umum dijabat oleh Tommy Soeharto dan partai perindo yang juga *figure* sentralnya yakni ketua umunya dijabat oleh Harry Tanoesoedibjo. kedua nama tersebut sudah tak asing lagi di telinga kita bersama dalam dunia politik di Indonesia. penggunaa *figure* merupakan hal yang disebut strategi politik.

Menurut Harmel dan Svasand, kepemimpinan dengan sosok yang berkarisma atau populer, yang mungkin bisa menarik pendengar atau khalayak ramai dan mengasosiasikannya tidak hanya dengan pemimpin, tetapi dengan partai. Dengan adanya pemimpin partai yang memiliki karakteristik tersebut, akan

mendapatkan manfaat ketika loyalitas pemilih masih cair. Banyaknya pemilih yang cenderung berhubungan dengan partai baru melalui kepribadian tertentu dari pemimpin partainya. popularitas memang suatu hal yang penting, begitupun dalam politik itu merupakan hal yang terpenting.

b) Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat ketertarikan seseorang untuk memilih suatu hal. Dalam konteks politik elektabilitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat ketertarikan masyarakat umum terhadap figure politik, lembaga politik, atau partai¹⁰.

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan¹¹. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik Karena elektabilitas mengenai kecenderungan kuat seseorang untuk memilih, maka tak bisa dihindari konsep elektabilitas didahului oleh konsep popularitas.

Popularitas merupakan tingkat keterkenalan seorang kandidat atau sebuah partai politik oleh khalayak ramai. Bagaimana seorang kandidat atau partai politik akan dipilih jika tak dikenal, Tak kenal makanya tak dipilih menjadi postulat

¹⁰*dendy sugiyono, elektabilitas 2008*

¹¹Dendy Sugiono (2008:29),

dalam hal ini. Sehingga kedua konsep tersebut tak dapat dipisahkan, seperti kepingan uang logam.

Kerja-kerja sosialisasi dan komunikasi politik yang runut dan rapi, terukur dan berlanjut, menjadi kunci untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas seseorang. Penggunaan media komunikasi juga tak bisa dikesampingkan. Citra yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat atau sebuah partai politik, begitupun sebaliknya.

2.2.4. Defenisi partai politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—(biasanya) dengan cara konstitusional—untuk melaksanakan programnya. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana.

Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh deinisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).¹² Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).¹³

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori: Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan

¹² Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, hlm. 419. Miriam budiarjo *dasar-dasar ilmu politik*, hlm, 404

¹³ Sigmund Neumann. "Modern Political Parties," dalam *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352. and Miriam budiarjo *dasar-dasar ilmu politik*, hlm, 404

publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public oice*).¹⁴

2.2.5. Fungsi Partai Politik

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negaranegara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai di negara-negara komunis pada masa jayanya.

Fungsi di Negara Demokrasi Sebagai Sarana Komunikasi Politik Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

¹⁴ 11G. Sartori, *Parties and Party Systems*, hlm. 63. and Miriam budiarjo *dasar-dasar ilmu politik*, hlm, 404-405.

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Sebagai Sarana Sosialisasi Politik, Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992): Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (Political

socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena). Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik.

Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional

dan integrasi nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik. Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi negara-negara berkembang menjadi begitu penting.

Sebagai Sarana Rekrutmen Politik, Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya.

Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara

untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*) Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat *heterogen*, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang *heterogen* sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari ahli yang lain, Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart: Perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. (*Segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation*).

Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang

beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif.

Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi dapat dilihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat yang rendah kadar konsensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.

2.2.6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia. Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973, Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarno putri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI. Namun pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarno putri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Sukarno Putri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (MUNAS) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarno Putri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI. Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarno Putri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarno Putri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

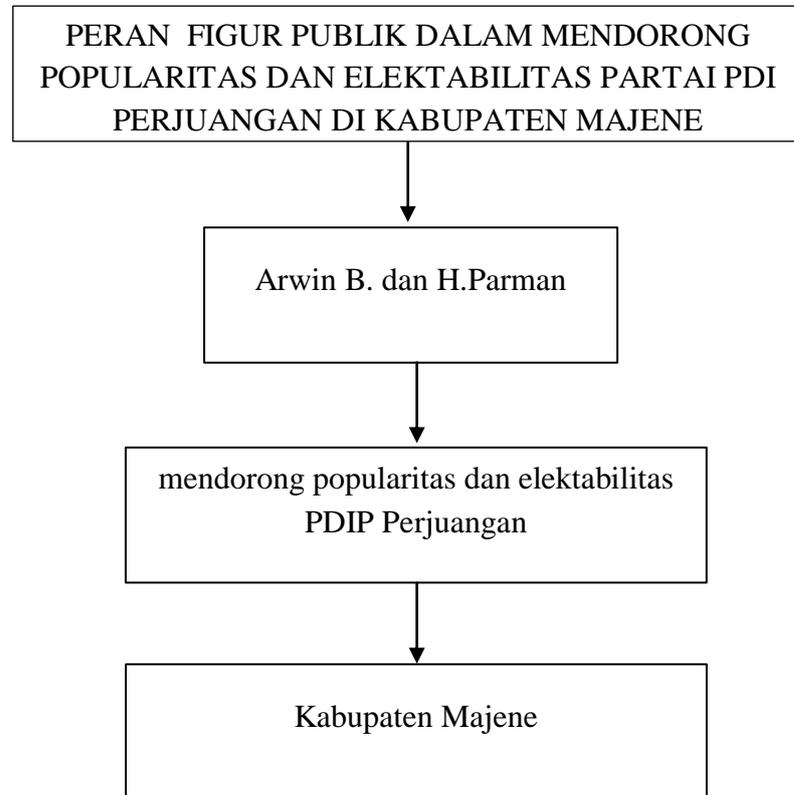
Megawati Sukarno Putri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut

disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarno Putri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.

2.3. Kerangka berfikir

Sesuai dengan dasar teori yang digunakan yakni teori peran oleh Soerjono Soekanto. dengan menggunakan teori Peran, dengan penjelasan teori peran oleh Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana Peran figur dalam mendorong Popularitas Dan Elektabilitas Partai PDI Perjuangan. Figur public yakni Arwin B. dan H. Parman. Adapun model penyajian kerangka sebagai berikut :

Kerangka pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai penulisan yang menghasilkan data bersifat deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

3.2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di daerah kecamatan Banggae Timur dan di kecamatan Tubo Sendana selaku figure publik dari PDI Perjuangan. Waktu penelitian ini dilakukan selama satu bulan penuh, pada tahun 2023.

Penelitian ini sebagaimana yang dimaksud untuk menggali atau menganalisis data untuk mendapat gambaran serta informasi yang jelas mengenai peran figure public dalam mendorong popularitas dan elektabilitas partai PDI Perjuangan.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data agar hasil data penelitian maksimal. Data yang peneliti gunakan adalah jenis data primer dan data skunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan sebagaimana untuk mengetahui peran Arwin B dan H. Parman dalam mendorong popularitas dan elektabilitas partai PDI Perjuangan di kabupaten Majene. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan yakni Arwin B. dan H. Parman mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan dicatat oleh pihak lain atau melalui pihak ketiga. Data sekunder ini berasal dari dokumen – dokumen, undang – undang, arsip dan data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan

penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.¹⁵ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Di dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data, penulis melakukan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.¹⁶

¹⁵ Menurut Sugiyono (2018:224)

¹⁶ Menurut Sugiyono (2018:229)

Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di dalam penelitian ini langsung terjun ke objek penelitian di tempat kediaman Arwin B dan H. Parman seorang figure di PDI Perjuangan.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait.

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti¹⁷. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.

Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan

¹⁷Yusuf (2014:372)

penelitian. Informan utama (key informan) dalam wawancara ini adalah arwin B dan H. Parman

Pada periode ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti¹⁸. Peneliti menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Kemudian hasilnya dicatat sebagai informasi dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini akan dilakukan pada Figur PDI Perjuangan di kabupaten Majene. Adapun pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi. Jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

Teknik penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data seperti data berbagai dokumen yang akan menguatkan penelitian ini dan foto-foto sebagai bukti otentik di lapangan berkaitan dengan kebutuhan peneliti yakni dokumentasi yang berupa foto saat melakukan proses pengambilan data di kediaman Arwin B. dan H. Parman selaku figur dari PDI Perjuangan di Kabupaten Majene.

¹⁸sukardi (2003:79)

3.5. Teknik Analisis data

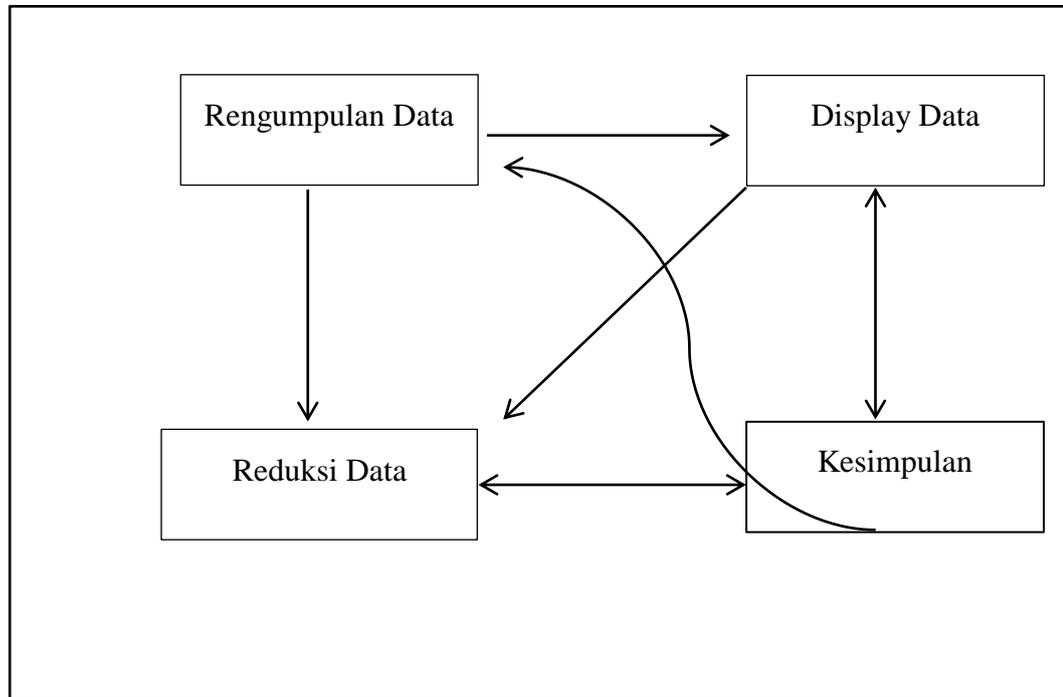
Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori. Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terusmenerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:

Komponen Analisis Data



Gambar1.komponen analisis data sumber: sugiyono (2018)

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹⁹ Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

¹⁹ Sugiyono (2018:247-249)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data perlu diolah menggunakan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok.

Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan hal pertama dalam analisis data. Peneliti memperhatikan data dengan berfokus pada perumusan data, sehingga lebih terarah dan membuang beberapa data yang tidak penting sehingga peneliti dapat dengan mudah dalam pembuatan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah pengujian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yakni diuraikan dalam bentuk kata atau kalimat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya.

Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁰

²⁰ Sugiyono, 2018:249).

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan dua tahap di atas, hal selanjutnya yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan ini memuat semua informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan²¹. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

²¹Sugiyono (2018:252-253)

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- HB Habibi Subandi , Ahmad Hasan Ubaid, Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2020*
- Dwi Kurnia Rizki, Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang, jurnal politik muda*
- Hamiruddin survey dan konsultan politik : Membangun Popularitas Dan Elektabilitas Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Iain-Bone*
- Hamidi.(2004). Metode penelitian kualitatif. Malang: UMM press*
- Milles ,& A., H (1992, analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia*
- Wahyuni Choiriyati & Ida Wiendijarti Popularitas Selebriti sebagai Komoditas Politik Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*
- M. Rizky Ganda Hutama1 , Ratnia Solihah2 , Firman Manan3,Dilema Penggunaan Figur Sentral: Antara Idealisme Dan Kebutuhan Suara Bagi Partai Solidaritas Indonesia, Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Koresponden E-mail: mrgandahutama@gmail.com, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 2021*
- Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow)*
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.*
- Nurul, l.r.l., 2019. Pengaruh penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap tingkat perolehan suara pada pemilihan kepala daerah jawa barat tahun 2018 di kota bandung (doctoral dissertation, universitas pendidikan indonesia).*
- Sidik, Firdan Fadlan. "Dualisme Peran Ulama Pasca Kemerdekaan: Studi Peran KH Hoemaidi Soleh Tahun 1900-1960." Hikayat: Jurnal Ilmu Sejarah 1.1 (2022).*

Buku

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, cet. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RDN*. Bandung: Alfabeta, (2010)
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cetakan ke-19 oktober 2013.
- Edy Suhardono, *teori peran : konsep, derivasi dan implikasinya; pengantar, sarlito wirawan sarwono*. Jakarta gramedia pustaka, 1994
- Hamdi Muluk, *Mozaik Psikologi Politik Indonesia* , Depok : Raja Grafindo Persada, 2017 (2010)
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. cetakan 48 (2017)
- Yusa Djuyandi. *Pengantar Ilmu Politik Suatu Dasar Bagi Pemula*, Raja Grafindo Persada, maret 2019
- Muhammad labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori Konsep Dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada maret 2019
- Firmansyah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Dan Era Demokrasi Edisi Revisi*, yayasan pustaka obor Indonesia. february 2017
- soekarno, *Dibawah bendera revolusi*, Penerbit Media Pressindo, 2019
- Peter L Berger, Thomas Luckmann. *tafsir sosial atas kenyataan : risalah tentang sosiologi pengetahuan*, Jakarta : LP3ES, 2018.
- Kartono, Susi Dyah Fatmawati. *Proses perumusan Pancasila* Penerbit: CV. Mutiara Aksara 2019
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1998, cet. Ketiga.
- Franz Sagnis Suseno, *Etika Politik* penerbit gramedia pustaka utama cet. Oktober 2016
- Sayiman Suryohadiprojo, *budaya gotong royong dan masa depan bangsa*, penerbit Kompas 2017
- Arbit Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2010

situs/web

peta dapil daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota majene provinsi sulawesi barat
<https://sidapil.kpu.go.id/api/petadapil/2024/76/05/1>

PDI perjuangan. <https://pdiperjuanganlampung.id/sejarahpdiperjuangan/>

bps kabupaten majene, kecamatan banggae dalam angka, banggae Subdistric in Figures.<https://majenekab.bps.go.id>

bps kabupaten majene, kecamatan banggae timur dalam angka, banggae timurSubdistric in Figures.<https://majenekab.bps.go.id>

bps kabupaten majene, kecamatan pamboang dalam angka, pamboang Subdistric in Figures.<https://majenekab.bps.go.id>

bps kabupaten majene, kecamatan sendana dalam angka, sendana Subdistric in Figures.<https://majenekab.bps.go.id>

bps kabupaten majene, kecamatan tamerodo sendana dalam angka,tamerodo Sendana Subdistric in Figures 2021. <https://majenekab.bps.go.id>

bps kabupaten majene, kecamatan tubo sendana dalam angka, tubo sendana Subdistric in Figures 202.<https://majenekab.bps.go.id>